

Perdamaian Dunia dan Implementasinya di Negara Indonesia

Gunawan Santoso^{1*}, Adinda Putri Darmanto², Dyah Ayu Putri Zahra³, Dyah Wulandari⁴, Firna Afifatun Nuha⁵, Almaira Putri⁶, Reni Oktafiani⁷
^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Muhammadiyah Jakarta

*Corresponding email: mgunawansantoso@umj.co.id

Abstrak - Dalam suatu Negara tidak dapat berdiri sendiri, seperti halnya individu sebagai makhluk sosial. Negara tentunya akan memerlukan Negara atau komponen yang lain. Bahkan adapula Negara yang memiliki keterkaitan serta ketergantungan dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. Jika adanya keterkaitan antar Negara dengan Negara lain tersebut tentunya ada sebuah hubungan yang baik. Salah satunya merupakan Negara kita sendiri yaitu Negara Indonesia dengan Negara-negara lain. dinamakan masyarakat global, ditandai adanya saling ketergantungan antar bangsa, adanya persaingan yang ketat dalam suatu kompetensi dan dunia cenderung berkembang ke arah perebutan pengaruh antar bangsa, baik lingkup regional maupun lingkup global. Namun pada kenyataannya masih banyak hubungan yang bertentangan antara Negara satu dengan Negara yang lain. Yang mengakibatkan terjadinya konflik dan terusiknya perdamaian dunia. Konflik biasanya dipicu dengan adanya masalah dalam hal sosial, ekonomi, politik, agama maupun kebudayaan. terjadinya konflik akibat adanya keserakahan, kurang saling menghargai dan mengerti antara satu dengan yang lain. Dari masalah di atas dalam makalah ini akan membahas apa yang dimaksud dengan perdamaian dunia itu sendiri dan cara mewujudkan perdamaian dunia serta partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia.

Kata Kunci : Perdamaian Masyarakat Global.

Abstract - In a country cannot stand alone, just like individuals as social beings. Of course, the state will need a state or other components. In fact, there are countries that have links and dependencies in economic, social and political aspects. If there is a relationship between countries and other countries, of course there is a good relationship. One of them is our own country, namely Indonesia and other countries. It is called a global society, characterized by interdependence between nations, there is intense competition in competence and the world tends to develop towards a struggle for influence between nations, both regionally and globally. But in reality there are still many contradictory relations between one country and another. Which resulted in conflict and disturbing world peace. Conflicts are usually triggered by problems in social, economic, political, religious or cultural terms. the occurrence of conflict due to greed, lack of mutual respect and understanding between one another. From the problems above, this paper will discuss what is meant by world peace itself and how to achieve world peace and Indonesia's participation in world peace. **Keywords**: Global Community Peace.

Keywords: Global Community Peace.

Pendahuluan

Perdamaian tidak akan bisa dicapai secara instan. Untuk mencapainya perlu perkembangan dan proses berkelanjutan. Tanpa adanya perdamaian, kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi

dan politik tidak mungkin tercapai. Hal ini dikarenakan tidak adanya sikap toleransi yang memungkinkan keharmonisan dan kerjasama sosial antar masyarakatnya (Pendidikan Transformatif, Syafitri Atmadja, Najmi Salma Herdani, Santoso, & Muhammadiyah Jakarta, 2022). Toleransi sendiri adalah menghargai perbedaan dan kemampuan untuk hidup dan membiarkan orang lain hidup dengan hidupnya. Toleransi merupakan kemampuan untuk memberikan sikap yang objektif dan adil pada pendapat, perilaku, ras, dan agama yang berbeda. Bukan hanya sekedar tidak memperdulikan perbedaan, toleransi lebih mengarahkan manusia untuk menunjukkan rasa hormat pada perbedaan tiap manusia.

Toleransi merupakan salah satu kunci utama dalam memelihara perdamaian dan menjauhi konflik dalam kehidupan bermasyarakat (Yusuf, 2013). Dengan adanya toleransi bahkan ketika ada konflik, kelompok yang berkonflik akan menahan rasa sakit masa lalu dan menyelesaikan perbedaan secara damai. Perpecahan dan konflik pasti akan terlahir tanpa adanya sikap toleransi. Pada dasarnya, manusia diciptakan dengan berbagai macam perbedaan. Lokasi hidup, agama yang dianut, pendidikan, keadaan sosial akan membentuk karakter dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Nilai-nilai hidup yang berbeda sangat rentan menimbulkan sebuah kesalahpahaman dalam komunikasi tanpa adanya toleransi akan perbedaan. Hanya dengan rasa saling percaya masyarakat dapat membangun perdamaian (Avifah Dwi Apriliani, Chairudin, Hariyanti, Puteri Ramadhanti, Afriza Aprilian, Nur Fauzaan, & Santoso, 2022).

Rasa saling percaya harus dibangun dengan pendidikan karakter yang mendukung rasa pengertian, toleransi, saling hormat, dan komunikasi (Cicilia, Marsidi, Martini, & Santoso, 2022). Bibit perdamaian dan toleransi beragama ini harus ditanamkan sejak dini didalam diri anak-anak, agar generasi penerus bangsa yang terbentuk adalah generasi cinta damai. Rumusan masalah dari latar belakang masalah yang sudah kami paparkan ialah 1. Apa arti perdamaian? 2. Apa peran Indonesia terhadap perdamaian dunia 3. Bagaimana cara mewujudkan perdamaian dunia?. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah Untuk memahami arti perdamaian, Mengetahui peran Indonesia dalam perdamaian dunia, Mengetahui cara mewujudkan perdamaian dunia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, jurnal, literatur yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian, (Syahputra M.R. dan Darmansah 2020:21 studi pustaka merupakan kegiatan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Santoso, Murod, Winata, & Kusumawardani, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Pendekatan cultural dalam perdamaian dunia Paradigma Pendidikan Karakter memang tergolong isu baru, seiring dengan banyaknya penelitian yang dilakukan yang memicu meningkatnya kesadaran di dunia pendidikan dalam skala internasional bahwa ternyata membentuk karakter individu jauh lebih penting daripada meningkatkan intelektualitas itu sendiri (Avifah Dwi Apriliani, Chairudin, Hariyanti, Puteri Ramadhanti, Afriza Aprilian, Nur Fauzaan, & Santoso, 2022). Pendidikan karakter akan menciptakan manusia yang lebih utuh dan unggul secara mental, sehingga bukan hanya membuat pribadi yang bersangkutan menjadi lebih tangguh dan kompetitif, tetapi juga bisa memedarkan resonansi positif bagi lingkungan di sekitarnya, sehingga kualitas dari sektor sumber daya manusia suatu bangsa akan meningkat secara menyeluruh. Sesungguhnya pesan pendidikan karakter telah tersirat dalam bait lagu kebangsaan Kita “bangunlah Jiwanya, bangunlah badannya” yang kembali membuka mata Kita bahwa ini merupakan pesan yang cukup jelas dari para founding fathers Kita tentang pentingnya membangun karakter bangsa ini. Di era globalisasi mutli dimensi sekarang ini, Kita bisa melihat bagaimana negara-negara dengan penduduk yang berkarakter positif menjadi lebih maju dan kuat, baik secara ekonomi, politik, budaya dan kesadaran hukumnya. Di lain pihak, Kita mengamati kondisi aktual dari bangsa kita sendiri, Kita menyaksikan bagaimana dekadensi moral lintas generasi yang serius telah terjadi secara masif pada bangsa ini di hampir semua sektor, korupsi terjadi pada hampir semua lembaga dan instansi baik negeri maupun swasta, konspirasi yang menyelewengkan uang negara antara executive dan legislatif terjadi diberbagai daerah, maraknya mafia peradilan, jual beli hukum yang membuat rasa keadilan semakin jauh dirasakan masyarakat, begitupun dengan generasi muda Kita, kenakalan remaja, pelajar bahkan mahasiswa, banyaknya pemerkosaan brutal dibawah umur baik korban maupun pelakunya, pornografi, peredaran narkoba yang seolah tak pernah bisa dibasmi secara tuntas dan lain sebagainya, sangat dominan menghiasi halaman berita diberbagai media. Sungguh sebuah ironi yang sangat dramatis bagi sebuah bangsa besar dan memiliki cita-cita besar, sebuah Bangsa yang dulu secara internasional dikenal dengan istilah Nusantara yang dikenal sejarah memiliki alam yang indah dan subur dengan penduduk yang memiliki karakter, budaya dan adat istiadat yang berbudi pekerti luhur dan mulia.

Pendidikan Karakter, Karakter secara terminologi adalah tabiat: watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti membedakan seseorang daripada yang lain (Kamus Poerwadarminta) (Santoso, Murod, Winata, & Kusumawardani, 2023). Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa setiap individu memiliki sifat dan perilaku yang berbeda yang terbentuk setelah dia lahir dan mendapatkan pengaruh dari keluarga, lingkungan dan pendidikan yang membentuk pola berpikir, pola bersikap, pola berperilaku yang pada akhirnya membentuk watak individu tersebut menjadi sebuah

karakter yang bersifat kuat permanen dan menetap. Menurut bambang Nurokhim (artikel Cakrawala TNI AL, 2007:3) menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan upaya yang harus melibatkan semua pihak baik rumah tangga dan keluarga, sekolah dan lingkungan sekolah dan juga masyarakat. Pembentukan karakter dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu oleh keluarga, sekolah dan lingkungan. Keluarga sangat berperan penting dalam pembentukan karakter anak, karena anak lebih mempunyai banyak waktu dengan kedua orang tua. Ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, yang artinya sifat dan perilaku seorang anak tidak jauh berbeda dari sifat dan perilaku orang tuanya. Tomas linckona menyatakan bahwa kita hidup dalam dunia dimana media mengendalikan kultur dengan mempromosikan pertentangan dan hedonisme serta menghancurkan nilai-nilai yang dapat membangun karakter yang baik. Keluarga-keluarga di dunia sekarang lebih stres dan terpecah belah lebih dalam dari sebelumnya dan lebih sedikit waktu untuk berinteraksi diantara anggota keluarga mereka sendiri untuk mewariskan nilai-nilai luhur pada pembentukan karakter anak. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa generasi penerus bangsa sekarang pembentukan karakternya banyak dipengaruhi oleh media massa dimana informasi, konten dan materi dari media tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Pada realitanya hidup tidak selalu berjalan dengan baik, maka peran keluarga sangat penting untuk membentuk karakter seorang anak akan tetapi keluarga yang tidak memahami cara mendidik dan membimbing seorang anak mereka lebih sibuk dengan urusan keseharian dan dunia mereka sendiri. Padahal keluarga berperan penting dalam membentuk karakter penerus bangsa untuk menjadikan karakter yang baik demi menjadikan bangsa ini lebih bersih, kuat dan berjaya di masa depan.

Pendekatan Kultural, Pendekatan kultural bersifat humanis dalam memandang manusia sebagai entitas yang utuh baik secara fisik maupun spiritual (Santoso, Salsabilla, Murod, & Faznur, 2023). Hidup manusia tidak hanya berkaitan dengan urusan fisik tetapi juga berkaitan dengan aspek kultural dalam diri manusia (Dr Junaidi 2012). Pendekatan kultural memiliki keunggulan bila diaplikasikan dalam pembentukan karakter. Pertama, bersifat holistik. Manusia memiliki jiwa dan raga. Bahkan hakekat manusia itu ada pada jiwanya sehingga pendekatan kultural melalui keluarga bisa membantu seseorang untuk membentuk karakter yang lebih baik. Manusia sebagai satu-satunya makhluk Tuhan yang memiliki kebudayaan dan dikaruniai potensi kreatifitas untuk dapat bertahan hidup di alam semesta. Dalam menjalankan kreatifitasnya manusia memiliki sistem moral, rasa, etika, nilai-nilai, adat, tradisi, etika, dan estetika. Pada dasarnya sifat manusia yang tidak pernah puas dengan yang mereka miliki dan mempunyai rasa keinginan tahu yang tinggi dengan adanya pendekatan kultural diharapkan bisa menjadi alat atau perisai manusia tersebut untuk membatasi kreatifitas sehingga dapat mengendalikan perbuatan atau sikap yang buruk, dan rasa kasih sayang terhadap orang lain tinggi, sehingga dapat meningkatkan martabat manusia. Kedua, bersifat partisipatif. Pendekatan kultural

memberikan ruang yang lebih luas kepada keluarga atau masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pembentukan karakter. Keluarga diposisikan sebagai subjek utama sehingga peran keluarga sangat penting untuk pembentukan karakter. Ketiga, pendekatan kultural memberikan penghargaan pada kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat. Setiap keluarga atau masyarakat memiliki tradisi-tradisi luhur yang dapat dijadikan dasar untuk membentuk karakter. Keempat, pendekatan kultural sangat menghargai perbedaan budaya yang terdapat dalam masyarakat. Pendekatan ini mendukung pluralisme sehingga keberagaman budaya, bangsa, agama, dan etnis tidak menjadi hambatan dalam pembentukan karakter. Justru, sebaliknya keberagaman menjadi kekuatan besar untuk mendukung pembentukan karakter yang lebih baik sehingga menjadikan manusia lebih beradab. Keberagaman dalam keteraturan membuat setiap orang merasa dihargai sebagai manusia yang mempunyai hak untuk hidup. Kelima, pendekatan kultural memberikan penekanan pada aspek hubungan manusia atau human relation. Manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi dengan sesama manusia. Menjalin hubungan dengan sesama manusia sangat perlu dilakukan dalam pembentukan karakter. Keenam, pendekatan kultural sangat memperhatikan keseimbangan alam. Alam dan kebudayaan merupakan dua unsur yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Kebudayaan itu dikreasikan manusia untuk dapat beradaptasi dengan alam. Dengan kemajuan teknologi sifat manusia menjadi lebih serakah dimana eksploitasi alam semakin meningkat karena ditunjang oleh teknologi yang memudahkan untuk dapat meneksploitasi alam. Hal ini tidak benar, karena semakin alam dieksploitasi maka bencana alam sering terjadi, contohnya banjir dan membuat pemanasan global. Dalam hal ini pendekatan kultural sangat penting untuk membentuk karakter manusia sehingga bisa membentuk manusia yang bermartabat.

Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di dunia. Bangsa Indonesia harus terlibat dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia karena perdamaian dunia merupakan cita-cita kemerdekaan dan tujuan politik luar negeri Indonesia (Azmi Ramadhania, Almaira Putri, Ghaitsa Geifira Sofa, 2022). Indonesia dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan perdamaian dunia dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki peran aktif dalam perdamaian dan keamanan global. Berikut adalah beberapa contoh peran yang dimainkan oleh Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia: Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

Peran Indonesia dalam perdamaian dunia diwujudkan melalui partisipasi dan kontribusi aktif dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB atau MPP PBB (Nur syarifah Fina, Cahyani, Kamilah, & Santoso, 2022). Asal Mula Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi ini merupakan bentuk organisasi yang memiliki sifat universal bagi seluruh dunia. Kegiatan yang menjadikan pertama kali terciptanya Perserikatan Bangsa Bangsa ketika Para petinggi dunia seperti Amerikat

Serikat dan Inggris menjalankan perbincangan eksklusif dan akhirnya menciptakan deklarasi mengenai hak kebebasan, kemerdekaan, dan perdamaian bagi negara-negara di dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa hadir sebagai organisasi yang termasuk subjek hukum internasional. Sebagai Organisasi Internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki mempunyai hak dan kewajiban yang kemudian tercantum dalam konvensi-konvensi internasional yang dijadikan sebagai dasar aturannya. Maka dari itu, sebagai subyek hukum internasional dan organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakannya. Perkembangan perjalanan organisasi internasional selalu ada kaitannya dengan perkembangan hukum internasional itu sendiri. Sebelum keadaan masa hukum internasional saat ini ketika masa hukum internasional kuno, negara masih dijadikan sebagai subjek hukum satu-satunya dalam praktek hukum internasional. Untuk menghindari keadaan yang tidak stabil akibat sentralitas negara sebagai subjek hukum internasional, maka diciptakanlah suatu kerjasama yang akhirnya menciptakan sebuah organisasi internasional bernama Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa tercipta karena banyaknya konflik dan masalah perang antar negara di seluruh dunia. Sebelum terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa, sudah terlebih dahulu dibentuk organisasi internasional yang memiliki tugas menjaga perdamaian dunia yakni Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Januari 1920. Liga Bangsa-Bangsa tercipta karena adanya Perjanjian Versailles. Namun, Liga Bangsa-Bangsa membubarkan dirinya sendiri akibat gagal untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dunia setelah pecahnya Perang Dunia Kedua. Liga Bangsa-Bangsa yang seharusnya memiliki tugas untuk mengatasi dan mencegah segala konflik termasuk perang tidak dapat membendung konflik-konflik yang ada terutama perang dunia kedua tersebut dan tidak menjalani misi utamanya yaitu menjaga perdamaian dunia. Kemudian ketika setelah berakhirnya perang dunia kedua, terdapat delegasi negaranegara yang melakukan pertemuan di Amerika Serikat dalam perjamuan antar negara untuk mencanangkan sebuah landasan hukum yang baik. Negara-negara tersebut melakukan pembicaraan mengenai ide-ide dari para delegasi petinggi dunia internasional. Akhirnya setelah melakukan pembicaraan bersama para delegasi negara internasional, kemudian setelah melakukan perundingan dengan negara-negara akhirnya terbentuklah Piagam PBB kemudian disetujui pada 1945 sejumlah 55 perwakilan petinggi negara dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian disahkan saat Oktober 1945 PBB kemudian Piagam tersebut dilakukan ratifikasi terhadap negara-negara di hampir seluruh dunia.

Piagam PBB merupakan sebuah perangkat dalam organisasi yang dijadikan sebagai landasan dalam berorganisasi organisasi yang menentukan wewenang anggota dan juga menentukan struktur serta mekanisme organisasi tersebut (Nur, Mahya², & Santoso³, 2022). Piagam yang telah dicanangkan merupakan sebuah perjanjian negara-negara yang memutuskan pokok perjanjian yang utama yaitu setiap negara setara dalam kedaulatan negaranya dan dilarang untuk menggunakan

langkah yang sewenang-wenang dalam hubungan internasional di bawah naungan PBB. Dapat disimpulkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki tujuan untuk menciptakan persekutuan internasional yang sejajar dan saling menjaga ketentraman dunia. Telah disebutkan dalam Piagam PBB bahwa pokok-pokok untuk melakukan kewajibannya dengan berlandaskan kesetaraan dalam kedaulatan para anggota negara. Setiap negara anggota memiliki tujuan yang baik dalam melaksanakan kewajibannya, agar tidak menggunakan cara represif terhadap negara-negara yang terkait dan tidak melakukan intervensi pada negara lain.

2. Peran Organisasi Internasional Dalam Memelihara Perdamaian

Dunia pejabat yang bertugas melakukan pengamanan sudah menjalankan kewenangannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada dalam organisasi PBB ini dalam menangani segala permasalahan konflik yang ada (Azmi Ramadhania, Almaira Putri, Ghaita Geifira Sofa, 2022). Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki tujuan yang sangat penting yaitu menjaga perdamaian dunia internasional serta keamanan antar negara. Semenjak terbentuknya organisasi ini, PBB sudah banyak didesak untuk melakukan langkah-langkah preventif dalam setiap konflik yang ada dalam perang dan melakukan cara dengan tidak menggunakan kekerasan pada negara-negara yang memiliki konflik. Memang dalam beberapa puluh tahun ini, PBB sudah melakukan penanganan terhadap konflik-konflik secara baik, Dewan Keamanan PBB digunakan sebagai alat utama untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Dewan Keamanan, Majelis Umum dan Sekretaris Jenderal, menjalankan kewenangannya dengan teratur dan lugas untuk segera melakukan pencegahan konflik-konflik tersebut. Aktifitas Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk bentuk yang penting untuk melakukan langkah-langkah preventif dalam permasalahan internasional guna menjaga stabilitas dan perdamaian pada tatanan dunia yang ada. Seiring berkembangnya zaman, permasalahan global yang timbul semakin baru. Pada saat yang sama juga terjadi permasalahan antar masyarakat sipil yang mengakibatkan konflik yang rumit mengenai pandangan masyarakat internasional yang tersedia, termasuk mengenai solusi untuk menjaga masyarakat sipil yang tengah menghadapi permasalahan. Dewan Keamanan sudah membentuk operasi penjaga perdamaian yang rumit dan kreatif yang berfungsi sebagai alat untuk menangani segala konflik dunia internasional di antara negara-negara.

Operasi penjaga perdamaian dunia tersebut telah membuat sebuah keadaan yang kondusif dan menghadirkan kondisi yang damai pada jutaan orang di belahan dunia. Mulai terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun sudah menjalankan tugas dan wewenangnya secara baik dan teratur dalam menangani konflik internasional. PBB memiliki partisipasi yang besar dalam mengatasi segala konflik-konflik internasional dengan cara rekonsiliasi dan tanpa menggunakan kekerasan, karena terdapat permohonan dari negara yang mengalami konflik tersebut untuk membantu menangani permasalahan dalam negaranya, atau memang PBB dengan sendiri tanpa permohonan

bantuan menangani permasalahan yang ada dalam negara karena memang permasalahan tersebut sudah kompleks dan menuju ambang kehancuran. Dengan begitu PBB mengirim pasukan militer bantuan kepada negara yang berkonflik untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun ada juga negara yang tidak ingin menerima bantuan dari PBB karena tidak ingin negaranya diintervensi oleh pihak lain. Peran serta PBB dalam menangani permasalahan dalam sebuah negara bermula atas permohonan dari negara yang memiliki permasalahan tersebut. Adanya ketidakmampuan pada negara-negara yang mengharapkan bantuan dari PBB sehingga menyebabkan negara tersebut meminta bantuan pasukan militer guna penyelesaian konflik yang ada (Gunawan Santoso, Aim Abdulkarim, Bunyamin Maftuh, Supriya, 2023).

Misi Garuda :Peran Indonesia dalam perdamaian dunia juga diwujudkan melalui partisipasi dan kontribusi aktif melalui Misi Garuda atau Misi Kontingen Garuda (Avifah Dwi Apriliani, Chairudin, Hariyanti, Puteri Ramadhanti, Afriza Aprilian, Nuur Fauzaan, & Santoso, 2022). Kontingen Garuda adalah pasukan penjaga perdamaian yang anggotanya diambil dari militer Indonesia yang bertugas di bawah naungan PBB. Pasukan ini terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Ide awal munculnya pasukan ini karena adanya konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1956. Saat itu, Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir sehingga menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lainnya. Dalam Sidang Umum PBB, Menteri Luar Negeri Kanada, Lester B. Pearson, mengusulkan agar dibentuk pemelihara perdamaian di Timur Tengah. Usul ini disetujui dan pada tanggal 5 November 1956, Sekretaris Jenderal PBB membentuk United Nations Emergency Forces (UNEF). Indonesia pun menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam UNEF dengan mengirimkan Misi Garuda I sampai Misi Garuda XXVI-C2. Menurut data Kementerian Luar Negeri pada Senin, 21 Maret 2016, Indonesia menjadi kontributor terbesar ke-10 pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari 124 negara. Saat ini, pemerintah Indonesia telah menugaskan 2.843 personel TNI dan POLRI yang bertugas di 10 Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Kontribusi pasukan Indonesia ke Misi Pemeliharaan PBB merupakan wujud pelaksanaan mandat Konstitusi yang mengamankan Indonesia untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Selain itu, pengiriman pasukan ini sebagai sarana peningkatan kapasitas dan profesionalisme personel TNI dan POLRI.

Konferensi Asia Afrika (KAA). Peran Indonesia dalam perdamaian dunia diwujudkan melalui partisipasi dan kontribusi aktif melalui Konferensi Asia Afrika (KAA) (Santoso, Karim, Maftuh, & Murod, 2023b). Upaya pertama yang dilakukan Indonesia oleh Perdana Menteri dimulai pada tanggal 25 Agustus 1953, dengan menyampaikan program pemerintah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) diawali dari ide Soekarno yang disampaikan oleh Ali Sastroamidjojo pada Konferensi Colombo. Idenya datang karena setelah Perang

Dunia II, banyak negara yang masih bersitegang karena adanya Blok Barat dan Blok Timur. Di Konferensi Colombo (Sri Lanka), pemikiran untuk menyelenggarakan KAA menjadi bahan pembicaraan utama. Tindak lanjut dari pembicaraan tersebut adalah dengan diadakannya Konferensi Panca Negara di Kota Bogor. Konferensi ini menghasilkan beberapa keputusan, yaitu: 1. Mengadakan KAA di Bandung pada bulan April 1955. 2. Menetapkan kelima negara peserta Konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor. 3. Menetapkan 25 negara Asia-Afrika yang akan diundang.

Pada tanggal 3 Januari 1955 di Bandung, dibentuklah sebuah panitia yang diketuai oleh Sanusi Hardjadinata, Gubernur Jawa Barat. Dari 25 negara yang diundang, Federasi Afrika Tengah menolak untuk hadir karena masih diserang oleh penjajah. Konferensi Asia-Afrika di Bandung berlangsung pada tanggal 18–24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 negara termasuk 5 negara sponsor KAA di dalamnya. Agenda dalam Konferensi ini antara lain membicarakan kerja sama ekonomi, budaya, hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri, masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka, perdamaian dunia dan kerjasama internasional, dan deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia. Konferensi ini menghasilkan Basic Paper on Racial Discrimination, Basic Paper on Radio Activity dan Declaration on the Promotion of World Peace and Co-operation. Dokumen Declaration on the Promotion of World Peace and Co-operation inilah yang kemudian dikenal sebagai Dasasila Bandung. Gerakan Non Blok (GNB) Indonesia memiliki peran penting sebab negara ini memiliki prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, tidak mendukung pakta militer atau aliansi militer manapun. Prinsip tersebut dianggap sesuai dengan tujuan didirikannya GNB (Santoso, Hidayat, Murod, Susilahati, Solehudin, & Asbari, 2023).

Deklarasi Djuanda: Peran Indonesia dalam perdamaian dunia adalah melalui Deklarasi Djuanda. Hal ini sebagai bentuk perjuangan di kancah internasional agar Indonesia memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah perairan dan pulau-pulauanya. Deklarasi Djuanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini dilatarbelakangi oleh tuntutan pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan RI tahun 1956, yang merasa hukum laut Indonesia saat itu tidak menguntungkan kepentingan wilayah Indonesia. Hukum laut Indonesia saat itu berdasarkan Zee En Maritieme Kringen Ordonantie (Ordonansi Laut dan Daerah Maritim) tahun 1939 dari Belanda. Kebijakan tersebut dapat membuat kapal-kapal asing masuk ke wilayah Indonesia dan mengambil sumber dayanya. Akhirnya, melalui Deklarasi Djuanda dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Deklarasi Djuanda kemudian dikukuhkan melalui UU No.4/PRP Tahun 1960 dan melahirkan konsep “Wawasan Nusantara”. Agar diakui oleh negara lain, deklarasi ini juga diperjuangkan dalam forum internasional melalui Konvensi Hukum Laut atau lebih dikenal dengan UNCLOS (United Nations Convention On The Law of The Sea) yang diadakan oleh

PBB. Deklarasi Djuanda baru dapat diterima di dunia internasional setelah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang ke-3 di Montego Bay (Jamaika) pada 1982. Berdasarkan hasil konvensi tersebut, Indonesia diakui sebagai negara dengan asas Negara Kepulauan. Setelah diperjuangkan sekitar 25 tahun, akhirnya pada 16 November 1994 dengan persetujuan dari 60 negara, hukum laut Indonesia telah diakui oleh dunia internasional. Indonesia harus berterimakasih kepada Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dan Prof. Dr. Hasjim Djalal, yang setia mengikuti berbagai konferensi tentang hukum laut yang dilaksanakan PBB dari tahun 1970-an hingga tahun 1990-an. Berkat mereka, kedaulatan wilayah laut Indonesia bisa diakui internasional.

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) : Peran Indonesia dalam perdamaian dunia adalah melalui Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), suatu perserikatan atau organisasi antar bangsa yang wilayahnya berada di kawasan Asia Tenggara (Salyo, Syah, Mikawati, & Santoso, 2022). Negara Indonesia merupakan salah satu negara termasuk pemrakarsa berdirinya ASEAN. Hal ini melalui perwakilan Indonesia yakni Menteri Luar Negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Selain itu, tentunya Indonesia juga memiliki peran tersendiri sebagai anggota ASEAN. Organisasi Konferensi Islam (OKI) : Peran Indonesia dalam perdamaian dunia adalah turut berpartisipasi dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Pembentukan OKI dilatarbelakangi oleh pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh Israel pada 21 Agustus 1969. Jakarta Informal Meeting (JIM) merupakan upaya peran Indonesia dalam perdamaian dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara. Pemrakarsa JIM yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas. JIM merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik Kamboja. Melalui JIM, masalah Kamboja dapat diselesaikan berdasarkan Perjanjian Paris pada tanggal 23 Oktober 1991.

Solidaritas Wujudkan Perdamaian Dunia : Pada Sidang IPU ke-144, DPR RI mendorong perdamaian dunia termasuk memecahkan masalah dari konflik Rusia-Ukraina. Tak hanya itu, parlemen Indonesia juga turut menyuarakan persoalan konflik di Palestina-Israel dan Myanmar, dimana penting bagi organisasi IPU berperan mewujudkan perdamaian di seluruh belahan dunia manapun. FORUM parlemen dunia menyepakati munculnya emergency item yang mengangkat konflik antara Rusia dengan Ukraina. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon berharap resolusi yang dihasilkan dalam Sidang IPU ke-144 dapat mendorong aksi nyata bagi parlemen seluruh dunia untuk merawat perdamaian serta demokrasi dan memperjuangkan hukum internasional juga Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu parlemen Indonesia mengusulkan emergency item terkait penyelesaian konflik RusiaUkraina dalam Sidang IPU itu. Dimana terdapat upaya negara-negara di Eropa yang juga telah membuat suatu resolusi terkait agresi Rusia dan Belarusia terhadap Ukraina. “Draft resolusi (Eropa) itu cukup keras, karena memang satu pihak. Karena itu, kami merasa peran parlemen perlu ditonjolkan dalam memediasi, terutama untuk

perdamaian dan mencari solusi, tidak hanya sekedar mengancam,” ujar Fadli. Fadli mengatakan, dalam situasi krisis dan konflik, parlemen memiliki peran mendasar dalam menyelesaikan konflik atau membangun perdamaian abadi melalui proses dialog dan rekonsiliasi. Lebih lanjut, ia menjelaskan parlemen dunia memiliki dampak yang sangat besar terhadap perdamaian dunia. Pada akhirnya keputusan sidang IPU menyepakati usulan emergency item dari New Zealand melalui mekanisme voting, yang secara substansi sejalan dengan usulan Indonesia. Dimana menurut Fadli, emergency item yang terpilih itu merupakan perpaduan dari usulan Indonesia dengan New Zealand yang berfokus pada penyelesaian konflik dan menghindari krisis kemanusiaan. Di sela-sela sidang IPU, Fadli juga menemui Presiden IPU Duarte Pacheco guna menawarkan agenda pembahasan konflik antara Palestina dengan Israel. Bersama dengan perwakilan The League of Parliamentarians for Al-Quds, ia menyampaikan Indonesia hadir berupaya mewujudkan perdamaian dunia. “Kami berharap dengan pertemuan ini, bisa menjadi usaha untuk menghentikan konflik,” tutur Fadli. di tengah polemik terjadi di belahan dunia, konflik Palestina dan Israel dinilai sudah berlangsung cukup lama. Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda yang signifikan untuk menghentikan konflik tersebut. Untuk itulah delegasi parlemen Indonesia terus berupaya melobi perwakilan parlemen yang hadir pada gelaran IPU untuk mendukung kemerdekaan penuh atas Palestina.

Tak berhenti sampai disana, menurut Wakil Ketua BKSAP Mardani Ali Sera, DPR RI berupaya mendorong penyelesaian masalah konflik yang terjadi di sana. “Lobi-lobi masih dilakukan, di (forum IPU) sebagian teman-teman juga ada di general debate untuk merapikan draf,” sebutnya. Ia berharap isu Palestina-Israel nantinya mendapatkan perhatian khusus oleh peserta Sidang IPU. “IPU dan PBB yang kami jadikan dasar. Kami tidak ingin berdialog secara langsung. Jadi melalui IPU dan PBB yang akan mengusulkan (ke forum), kemudian kami ikut. Pokoknya, posisi kami two-state solution harus segera diwujudkan,” terang Mardani. Dalam kesempatan yang berbeda, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani turut menyoroti situasi demokrasi di Myanmar akibat konflik internal yang sudah terjadi setahun belakangan ini. Puan pun mendorong Myanmar kembali ke jalan demokrasi. “Terkait situasi di Myanmar, kita dapat mendorong agar Myanmar kembali ke jalan demokrasi,” ujarnya. Puan berharap IPU atau forum parlemen internasional itu bisa mengambil bagian untuk memastikan masing-masing negara memperkuat demokrasinya. Apalagi, ia bilang, demokrasi mengalami tantangan di tengah situasi pandemi Covid-19 sehingga perlu diperkuat fondasinya. “Sesuai tujuan IPU, kita harus menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat demokrasi, perdamaian, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan,” tandas Puan. Ia juga menyebut, Sidang IPU ke-144 dapat menjadi momentum bagi parlemen dunia untuk menyebarkan ‘budaya damai’ (culture of peace) yang selalu mempromosikan toleransi, dan dialog, serta menolak kekerasan.

Ilmu Pengetahuan dan Perdamaian Dunia. Setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Sains Sedunia (World Science Day) (Santoso, Karim, Maftuh, & Murod, 2023a). Peringatan Hari Sains Sedunia tahun ini bertemakan Sains untuk Perdamaian dan Pembangunan (Science for Peace and Development). Berdasarkan Encarta Reference Library 2003, sains adalah suatu studi tentang sesuatu hal yang dilakukan secara sistematis, yang bisa diuji dan dibuktikan kebenarannya. Kata sains sendiri berasal dari bahasa Latin *scire* yang artinya mengetahui, sehingga sains sering diartikan pengetahuan. Dengan kata lain, sains adalah cara untuk kita bisa mengetahui dan mengerti tentang sesuatu, mulai dari jagat raya sampai pada diri kita sendiri. Karena itu, sains bukanlah berarti pengetahuan (knowledge), sebab pengetahuan adalah hasil yang didapatkan dari sains itu sendiri. Sama halnya dengan sains, teknologi merupakan proses berpikir, mempelajari hubungan sebab-akibat, dan menggunakan metodologi percobaan yang menunjukkan hasil yang dapat dibuktikan dan diulang. Hanya saja sains lebih cenderung untuk pengembangan hukum dan teori, sementara teknologi lebih menitikberatkan kepada hal-hal yang aplikatif. Pendek kata, sains akan menghasilkan pengetahuan, sementara teknologi akan menghasilkan produk. Karena hasil sains adalah sebatas pengetahuan, maka sains tidak pernah buruk, sekalipun pengetahuan tersebut mencakupi pengetahuan tentang hal yang buruk. Tetapi, tidak demikian halnya dengan teknologi. Teknologi bisa digunakan untuk kebaikan dan juga keburukan, tergantung motivasi penggunaan teknologi tersebut. Teknologi bisa menghasilkan produk yang buruk jika didasari motivasi yang buruk. Begitu juga sebaliknya. Artinya, teknologilah yang menentukan apakah sains berfungsi baik atau buruk. Kita ambil saja pengetahuan tentang bakteri *Bacillus anthracis* dan racun Antraks sebagai contoh. Pengetahuan tentang karakter bakteri *Bacillus anthracis* yang bisa membentuk spora stabil, cara penularannya, serta bahaya racun yang dihasilkannya, bukanlah suatu hal yang buruk. Bahkan pengetahuan tentang itu merupakan pengetahuan yang berarti, karena dengan pengetahuan tersebut kita bisa menghindari penularannya. Begitu juga pengetahuan tentang virus-virus patogen lainnya. Pengetahuan tentang cara penularan virus human immunodeficiency virus (HIV), misalnya, tidak hanya membuat kita bisa menghindari penularannya, tetapi juga bisa membuat kita bijaksana. Dengan pengetahuan bahwa virus HIV hanya menular lewat cairan tubuh, dan tidak menular dengan hanya mendekati penderita AIDS, akan membuat kita tidak menjauhi dan mendiskriminasi penderita HIV/AIDS.

Ini merupakan salah satu contoh peranan sains untuk perdamaian (Santoso, Karim, Maftuh, & Murod, 2023b). Peran sains untuk perdamaian ini lebih terlihat lagi pada ilmu pengetahuan yang bersifat sosial seperti ilmu budaya dan agama. Jika kita mengerti dan paham bahwa manusia mempunyai agama dan budaya yang berbeda, kita akan mengakui dan menghormati eksistensi budaya dan agama lain. Dengan kata lain, tidak ada pemaksaan sesuatu ideologi terhadap sesuatu komunitas. Sistem demokrasi yang berlaku di Amerika, belum tentu berhasil diterapkan di negara lain yang kultur

dan latar belakangnya berbeda dengan Amerika. Itulah peranan ilmu pengetahuan untuk perdamaian yang diharapkan. Akan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini masih saja terjadi pemaksaan ideologi dan keyakinan, sehingga perdamaian tidak pernah terwujud di dunia ini. Begitu juga dengan kasus, di mana sebagian orang menyalahgunakan pengetahuan untuk merusak keamanan dan perdamaian. Adanya bioterorisme dengan menggunakan senjata biologi (biological weapon) adalah salah satu contohnya. Pengetahuan tentang Antraks seharusnya digunakan untuk mengembangkan vaksin dan obat antraks sebagai upaya penanggulangan ancaman Antraks itu sendiri. Akan tetapi sebaliknya, sebagian orang menggunakan pengetahuan tersebut untuk pengembangan senjata biologi, sehingga terjadilah aksi bioterorisme dengan menggunakan Antraks di Amerika Serikat pada bulan Oktober 2001. Tidak berbeda halnya dengan teknologi kloning dan rekayasa genetika. Teknologi yang dikembangkan untuk produksi bahan makanan secara efektif untuk memenuhi permintaan penduduk yang makin melimpah ini, ada kemungkinan akan disalahgunakan untuk produksi senjata biologi yang canggih. moralitas dan kebijaksanaan dalam implementasinya. Yang terjadi adalah, penyalahgunaan kemajuan teknologi untuk mencederai dan melukai, bukan untuk mendorong kemajuan peradaban.

Berbagai gambaran ke-tidak-seimbangan tadi meniscayakan hadirnya langkah terobosan (Santoso, Karim, Maftuh, & Murod, 2023c). Di sinilah peran penting dari gagasan Jalan Tengah, untuk mendorong terwujudnya keseimbangan tersebut, untuk meminimalisir, dan sekaligus menjadi solusi, atas terjadinya berbagai krisis global. Kata kunci dari konsepsi Jalan Tengah adalah toleransi dan inklusivitas. Toleransi mendorong lahirnya sikap moderat dan tenggang rasa, bahwa keberagaman dalam budaya, agama, dan berbagai atribut primordialisme lainnya, tidak menghapus fitrah bahwa kita adalah satu saudara dalam kemanusiaan. Gagasan Jalan Tengah juga harus dibangun oleh semangat inklusivitas, yang dapat merangkul semua kalangan. Tidak ada satu pun entitas global yang merasa tidak dilibatkan atau terwakili aspirasinya. Komitmen Global, setiap tanggal 21 September, lonceng perdamaian dibunyikan di markas PBB. Pada hari itu, aksi kekerasan ditiadakan, dan gencatan senjata diberlakukan. Merujuk pada kondisi dunia saat ini, semestinya lonceng perdamaian tersebut berdentang setiap hari. Saat ini, ketika kita sedang mendorong komitmen global untuk menjaga semangat perdamaian, di belahan bumi yang lain, konflik bersenjata masih terus berkecamuk. Tidak hanya perang Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan ratusan ribu korban tewas dan puluhan juta warga mengungsi, melainkan juga di beberapa negara lainnya yang hingga saat ini masih berjibaku menghadapi konflik. Di Yaman, sejak awal berlangsungnya konflik telah menyebabkan lebih dari 140.000 korban jiwa. Di Ethiopia, perang saudara menimbulkan lebih dari 9.000 kematian, bahkan menurut sumber lain, korban jiwa diperkirakan lebih dari 50.000 hingga September 2021. Di Afghanistan, pada tahun 2020 saja, jumlah korban jiwa akibat konflik bersenjata

mencapai 30.936. Dan di Myanmar, konflik bersenjata sepanjang tahun 2021 telah menyebabkan korban tewas sekitar 11.114 jiwa.

Di sinilah urgensi untuk menjadikan spirit Forum Perdamaian Dunia sebagai komitmen global. Perdamaian adalah konsep universal yang seharusnya begitu mudah untuk difahami dalam berbagai bahasa (Santoso, Rahmawati, Murod, & Setiyaningsih, 2023). Perdamaian sama bernilainya, baik bagi kita yang bertekad untuk memperjuangkannya, maupun bagi mereka yang “sedang” melalaikannya. Apa pun alasannya, perang hanya akan membawa kerugian, dan meninggalkan bekas luka dan trauma yang membutuhkan waktu lama untuk menyembuhkannya. Kita juga tidak boleh melupakan, bahwa perang yang sesungguhnya harus kita menangkan, adalah perang melawan kemiskinan, kebodohan, ketertindasan, serta ketidak-adilan. Perdamaian adalah keniscayaan bagi setiap komunitas internasional untuk dapat hidup berdampingan. Perdamaian adalah “titik temu” yang mengakomodir berbagai arus aspirasi dan kepentingan, karena dunia ini begitu kaya akan keberagaman, yang tidak mungkin dipaksakan untuk diseragamkan. Namun kita juga menyadari sepenuhnya, bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang given. Perdamaian harus dihadirkan sebagai komitmen kolektif dan diwujudkan dalam langkah implementatif.

Indonesia terus berupaya untuk merajut persahabatan dan menjalin kerja sama antarnegara untuk mewujudkan stabilitas dan perdamaian dunia (Nur, Mahya², & Santoso³, 2022). Sejumlah isu kawasan dan dunia mulai dari konflik Ukraina dan Rusia, situasi di Myanmar, Semenanjung Korea, Laut Cina Selatan, hingga non-proliferasi nuklir pun menjadi topik bahasan dalam pertemuan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida. “Pesan yang disampaikan Bapak Presiden pada intinya adalah di tengah situasi dunia yang penuh rivalitas, Indonesia justru lebih giat membangun kerja sama dan persahabatan dengan negara-negara dunia. Indonesia akan terus merajut persahabatan demi stabilitas dan perdamaian dan juga demi kemakmuran dunia,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi, dalam keterangan pers usai mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan, di Tokyo, Jepang, Rabu (27/07/2022). Presiden juga menekankan pentingnya semua negara menjaga stabilitas perdamaian di Laut Cina Selatan. “Satu-satunya jalan agar stabilitas dan perdamaian terjaga adalah dengan menghormati hukum internasional terutama UNCLOS 1982,” ujar Menlu mengutip Presiden. Selain itu, dalam pertemuan Presiden juga menyoroti mengenai situasi terkini di Myanmar. “Presiden menyampaikan kekecewaan terhadap tidak adanya kemajuan signifikan implementasi 5-Point Consensus,” kata Menlu. Di tengah ketegangan geopolitik yang disertai sejumlah persoalan dunia seperti perubahan iklim dan ketimpangan pembangunan, Think 20 (T20) sebagai salah satu engagement group memberikan sejumlah rekomendasi kepada G20 untuk menghidupkan kembali kerja sama global. Berdasarkan rekomendasi T20, kerja sama internasional sangat penting tidak hanya untuk mendorong perdamaian

dunia, namun juga mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pemulihan tata kelola global. Melalui komunikasi yang dihasilkan, T20 menjabarkan sejumlah strategi. Pertama, negara-negara besar perlu mengelola risiko geopolitik dengan bekerja sama dalam sistem perdagangan multilateral, mendukung mekanisme koordinasi arena pertemuan multilateral, dan mendesak terwujudnya upaya bersama pada kebijakan makroprudensial serta moneter. Kedua, negara perlu mengatur pembiayaan barang publik global serta melawan ketimpangan. Sejumlah caranya dengan memberikan pendanaan serta bantuan pemulihan berkelanjutan kepada lembaga keuangan multilateral. Selain itu juga mengimplementasikan pertukaran informasi otomatis yang lebih efektif, dan mempromosikan inisiatif mengurangi utang bagi negara yang berutang tinggi. Ketiga, perlu mengembangkan tatanan internasional baru dengan mendorong terciptanya Bretton Woods baru yang lebih adaptif dengan persoalan negara maju dan berkembang.

Hubungan internasional mempunyai peran penting bagi Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia (Salyo, Syah, Mikawati, & Santoso, 2022). Hubungan internasional merupakan hubungan yang dilakukan antar bangsa-bangsa di dunia dengan melampaui batas-batas negara. Ada beberapa pendapat mengenai hubungan internasional. Menurut beberapa ahli, hubungan internasional sering disamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Adapun makna dari konsep-konsep tersebut adalah: Politik luar negeri merupakan seperangkat kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain yang tujuannya agar dapat tercapainya tujuan bersama serta kepentingan nasional dari negara yang bersangkutan. Hubungan luar negeri merupakan keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Politik internasional merupakan politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antarnegara maupun antarnegara dengan organisasi internasional. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa, ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, ketiga konsep ini memiliki satu persamaan yang mendasar dalam hal ruang lingkungannya yang melampaui batas-batas negara. Komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional antara lain adalah: Politik internasional atau international politics. Studi tentang peristiwa internasional atau the study of foreign affair. Hukum internasional atau international law. Organisasi Administrasi internasional atau international organization of administration.

Indonesia sebagai sebuah bangsa yang merdeka, tentunya tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain (Salyo, Syah, Mikawati, & Santoso, 2022). Setiap negara membutuhkan dukungan dari negara yang lain untuk menjaga kelangsungan hidup bangsanya dan mempertahankan kemerdekaannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di awal kemerdekaannya, para

pendiri negara menjalin hubungan dengan berbagai bangsa di seluruh penjuru dunia sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan kemerdekaan negara Indonesia. Oleh karena itu, untuk dapat menciptakan perdamaian dunia maka Indonesia harus melaksanakan praktik hubungan internasional, dan meningkatkan kualitas kerjasama internasional yang sudah dibangun. Perdamaian dunia menjadi pesan yang diserukan Muhammadiyah menjelang Mukhtamar ke-8 di Solo 18-20 November mendatang. Ormas Islam modern itu menawarkan wasatiyah Islam atau Islam tengahan sebagai solusi mewujudkan perdamaian global. Pesan perdamaian dunia itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam acara World Peace Forum (WPF) ke-8 yang digelar di Hotel Sunan Surakarta kemarin (17/11). Haedar hadir secara daring, karena masih ada kegiatan yang bersamaan di Yogyakarta. Event internasional itu dibuka secara resmi oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Ketua WPF dan Center for Dialogue and Cooperation Among Civilizations (CDCC) M Din Syamsuddin. Hadir delegasi dari berbagai agama dan negara. Diantaranya, Penasehat Dewan Fatwa Al-Azhar Mesir Syaikh Abbas Suman, dan Dicastery for Interreligious Dialogue Vatican Rev. Laurent Basanese SJ.

Hadir pula Emeritus Professor of Indonesian Politics at The Australian National University Greg Fealy, President-Moderator of Asian Conference of Religions for Peace Desmond Cahill, Former Grand Mufti of Bosnia and Herzegovina Mustafa Ceric, serta Dean of Faculty of Islamic Sciences of Al-Azhar University Egypt Nahla Shabri Shu'aidi. Sebanyak 70 peserta lintas agama dari 20 negara ikut berdiskusi dan mencari solusi dalam acara yang mengangkat tema Human Fraternity and the Middle Path for Peaceful, Just and Prosperous World itu. Haedar Nashir menyampaikan bahwa WPF adalah forum penting untuk meluaskan gaung pesan-pesan Islam pada level global yang diharapkan membawa pada jalan Islam tengahan atau wasatiyat al-Islam. "Kami berkomitmen pesan wasatiyah Islam tidak hanya berhenti pada deklarasi, tetapi bisa direalisasikan dalam hidup sebenarnya penduduk muslim dan warga dunia," terangnya kemarin. Apalagi, lanjut dia, tantangan dunia hari ini begitu kompleks, seperti suburnya kecurigaan, ujaran kebencian, permusuhan, konflik dan perang, kekerasan pada anak dan perempuan, ekstrimisme, kemiskinan hingga diskriminasi dalam lingkup domestik, regional, dan global. Guru besar sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu berharap WPF dapat melahirkan rekomendasi bagi lahirnya dunia yang damai, adil, dan makmur disertai persaudaraan laki-laki dan perempuan dengan penuh penghargaan. Haedar menegaskan bahwa Islam sebagai agama peradaban. Islam menentang kekerasan apapun bentuknya, baik secara epistemik, fisik, maupun secara struktural. "Islam adalah khoiru ummah, komunitas terbaik, dan bangsa terbaik," ungkap tokoh asal Bandung itu.

Dia menyatakan, umat Islam harus menghadirkan keteladanan dan keberadaban dari nilai-nilai Islam otentik, seperti rahmatan lil alamin. Muslim harus menjadi role model dan menguatkan

persaudaraan antar umat manusia dengan penuh cinta dan solidaritas. Haedar mengatakan, WPF tersinkronisasi dengan Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah, karena tema yang diangkat senada dengan tema Muktamar, yaitu Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta. Dia pun mengundang para tokoh dan peserta WPF untuk turut hadir dalam pembukaan Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah pada 19 November. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, di tengah berbagai persoalan global yang terjadi, WPF menawarkan gagasan menarik untuk menjadikan persaudaraan insani dan jalan tengah sebagai pondasi dan titik tumpu. Tema itu sejalan dengan dokumen Human Fraternity for World Peace and Living Together yang ditandatangani Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar Ahmed el-Tayeb pada 4 Februari 2019 lalu.

Menurutnya, dokumen itu mengedepankan pendekatan transendental untuk membangun semangat persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. “Dokumen tersebut juga dapat dimaknai sebagai kritik atas realitas global, yang belum sepenuhnya sepadan dengan besarnya upaya untuk mewujudkan kehidupan dunia yang damai, adil, dan sejahtera,” terang Bamsuet. WPF ke-8 akan melahirkan Surakarta Message. Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, Surakarta Message bisa dimaknai sebagai pesan bersama mengenai persaudaraan dan perdamaian yang dibuat para yang berasal dari lintas agama dari negara-negara di dunia. Menurut Abdul Mu’ti, tema human fraternity atau persaudaraan manusia merupakan tema besar tingkat global yang digerakkan banyak masyarakat dunia.”Sehingga kami akan berusaha melanjutkan upaya-upaya yang juga telah menjadi perhatian besar dunia ini,” kata Abdul Mu’ti yang juga hadir dalam forum tersebut. Sementara itu, para peserta muktamar mulai berdatangan kemarin. Mereka memanfaatkan waktu luang untuk berkunjung ke beberapa tempat. Salah satunya Masjid Raya Sheikh Zayed Al-Nahayan Surakarta yang diresmikan Presiden Joko Widodo bersama Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed bin Zayed pada 14 November lalu. Namun, mereka hanya bisa berfoto di pedestrian jalan, karena masjid tersebut belum dibuka untuk masyarakat. Ketua Panitia Penyambutan Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah Sofyan Anif mengatakan, para peserta muktamar sudah mulai masuk Solo. “Ada ratusan bus yang datang. Mereka menyebar di beberapa lokasi,” terangnya saat ditemui di sela-sela acara WPF kemarin.

Banyak tempat yang disiapkan bagi mereka. Yaitu, Stadion Manahan, kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), gedung sekolah Muhammadiyah, dan fasilitas amal usaha lainnya. Bahkan, beberapa yayasan pendidikan non Islam juga menyiapkan tempat penginapan bagi muktamirin. Sofyan yang juga menjabat Rektor UMS itu mengatakan bahwa sebanyak tiga juta orang akan hadir dalam muktamar yang sempat tertunda dua tahun karena pandemi Covid-19 itu. Dia menegaskan, persiapan muktamar sudah seratus persen. “Kami siap menyambut muktamirin,” ungkapny.

Menurut dia, pihaknya juga mengerahkan 10 ribu relawan untuk mensukseskan muktamar. Mereka akan membantu untuk melayani para peserta yang datang. Panitia juga menerjunkan 1.200 petugas keamanan. Sementara dari pihak kepolisian, akan ada 2.500 petugas yang dikerahkan.

Sejak 1945, Perserikatan Bangsa- Bangsa dan lima anggota permanen majelis keamanannya (AS, Rusia, China, Prancis dan Britania Raya) bekerja untuk menyelesaikan konflik tanpa perang atau deklarasi perang (Salyo, Syah, Mikawati, & Santoso, 2022). Namun, negara-negara telah memasuki sejumlah konflik militer sejak masa itu. Sebagai sebuah negara, Indonesia sangatlah memainkan peran aktif dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Hal demikian telah menjadi salah satu tujuan nasional. Kenapa Indonesia harus ikut andil dalam menjaga perdamaian dunia? Sedangkan di negara nya saja masih banyak berbagai macam problematika yang terjadi. Hal tersebut merupakan cita cita bangsa Indonesia dan telah di amanatkan oleh konstitusi negara dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4 yaitu; “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Oleh karena itu menunjukkan bahwa Indonesia dengan tegas menyerukan akan pentingnya peran dan keikutsertaan dalam berbagai permasalahan internasional. Agar menciptakan perdamaian dunia pemerintah Indonesia telah mengambil sikap dan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Konsep bebas aktif berlandaskan kepada Pancasila yang juga tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dalam hal ini, politik bebas aktif adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan langkah dan sikap serta kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikat diri secara priori pada suatu kekuatan dunia secara aktif. Seiring berkembangnya zaman dan semakin meluasnya era globalisasi, diharapkan Indonesia dapat terus berpartisipasi dalam menjaga perdamaian dunia serta tetap melakukan kerjasama dan menjalin hubungan diplomasi yang baik dengan negara-negara lain. Belum lama ini, Indonesia dengan tegas menyuarakan pembelaan terhadap Palestina. Hal ini disampaikan oleh menteri luar negeri (menlu) Retno Marsudi saat berkunjung di markas PBB di New York. Menteri luar negeri juga meminta kepada PBB agar secara aktif ikut memperjuangkan hak-hak Palestina yang lebih kurang sudah 13 tahun di serang oleh Israel agar konflik seperti ini tidak lagi terjadi di masa mendatang.

Hal semacam ini merupakan salah satu contoh keterlibatan bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian Indonesia di bawah mandat PBB, ikut secara aktif membantu menyelesaikan konflik di Kamboja dengan mensponsori penyelenggaraan (Salyo, Syah, Mikawati, & Santoso, 2022). Jakarta Informal Meeting (JIM 1) pada bulan Juli 1998 dan lain-lain. Hingga pada akhirnya November 2018, Indonesia telah menempati peringkat ke-7 dari 142 negara penyumbang personel pada misi perdamaian PBB. Indonesia telah melakukan ini sejak tahun 1957, tepat Indonesia baru berumur 12 tahun. Bentuk

dukungan yang dapat di berikan bangsa indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sepeti; menghargai budaya dan agama masing-masing, menyediakan lapangan pekerjaan atau bekerja dan ikut partisipasi atau berpendapat dalam memberikan solusi pada permasalahan yang terjadi di dunia.

Kesimpulan

Hubungan dan kerjasama antara bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri diseluruh dunia sehingga terjadi saling ketergantungan antara bangsa dan Negara yang berbeda. Karena hubungan dan kerjasama ini terus menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antara bangsa di dunia. Politik luar negeri adalah strategi yang digunakan suatu Negara dalam hubungannya dengan Negara-negara lain. Maka politik luar negeri berhubungan erat dengan kebijakan yang akan dipilih oleh suatu Negara. Hal ini terkait dengan politik luar negeri yang diterapkan Indonesia. Kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif tentunya merupakan strategi politik yang diterapkan Indonesia dalam politik global. Agar prinsip bebas aktif ini dapat dioperasioalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia maka setiap periode pemerintahan hendaklah menetapkan landasan operasional. Politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Perumusan politik luar negeri suatu Negara tak terlepas dari kepentingan nasional Negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, ketika kepentingan nasional suatu Negara terancam, maka politik luar negeri akan dikeluarkan sebagai salah satu upaya dalam mengamankan kepentingan nasional Negara yang bersangkutan. Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subyek-subyek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya. Pada prinsipnya sains atau ilmu pengetahuan adalah barang bagus, dan bisa berfungsi untuk menciptakan perdamaian. Namun terkadang bisa digunakan untuk tujuan buruk yang akan merusak perdamaian itu sendiri. Begitu juga halnya dengan teknologi, yang berpeluang bisa digunakan untuk tujuan baik dan tujuan buruk. Karena ilmu pengetahuan tersebut dimiliki dan dikuasai oleh ilmuwan (scientist), maka ilmuwan menjadi salah satu faktor penentu apakah ilmu pengetahuan tersebut akan memberikan manfaat atau mudarat buat orang banyak. Ilmuwan yang baik akan menggunakan ilmunya untuk kebaikan, dan sebaliknya ilmuwan yang tidak baik akan menggunakan ilmunya untuk tujuan yang tidak baik. Dalam hal ini, pendidikan menjadi salah satu faktor yang akan membentuk karakter ilmuwan itu sendiri. Kita berharap ilmuwan yang ada di negeri ini adalah ilmuwan yang akan memanfaatkan ilmunya untuk kebaikan.

Referensi

- Avifah Dwi Apriliani, N., Chairudin, M., Hariyanti, S., Puteri Ramadhanti, E., Afriza Aprilian, M., Nuur Fauzaan, M., & Santoso, G. (2022). Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik dalam Konteks Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 1(2), 156–164.
- Azmi Ramadhania, Almaira Putri, Ghaita Geifira Sofa, G. S. (2022). Menjadikan Warga Berjiwa : Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 01(03), 11–15.
- Cicilia, I., Marsidi, Martini, & Santoso, G. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Membentuk Generasi Penerus Bangsa yang Berkarakter. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 1(03), 146–155.
- Gunawan Santoso, Aim Abdulkarim, Bunyamin Maftuh, Supriya, M. M. (2023). Kajian Keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Internasional untuk Perdamaian Dunia di Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 224–240.
- Nur, S. A., Mahya2, A. F. P., & Santoso3, G. (2022). Revolusi Pendidikan di Era Society 5.0; Pembelajaran, Tantangan, Peluang, Akses, Dan Keterampilan Teknologi. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, Vol. 01 No, 18–28.
- Nur syarifah Fina, F. ., Cahyani, H. D. ., Kamilah, I. N. ., & Santoso, G. (2022). Pengenalan Lagu Daerah dan Lagu Nasional Republik Indonesia Untuk Calon Guru Sekolah Dasar Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(3), 44–61.
- Pendidikan Transformatif, J., Syafitri Atmadja, Z., Najmi Salma Herdani, K., Santoso, G., & Muhammadiyah Jakarta, U. (2022). Analisis Hukum Atas Implementasi UUD Negara Republik Indonesia dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JUPETRA)*, 1(3), 127–136.
- Salyo, R., Syah, I., Mikawati, H., & Santoso, G. (2022). Pancasila di Era Milenial : Makna dan Relevansinya Bagi Masa Depan Bangsa Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 01(02), 68–76.
- Santoso, G., Hidayat, M. N. S., Murod, M., Susilahati, Solehudin, & Asbari, M. (2023). Transformasi Literasi Informasi Guru Menuju Kemandirian Belajar. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 100–106. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/130/37>
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023a). Kajian Dinamika Demokrasi di Indonesia untuk Menjadi Tokoh Pahlawan Daerah dan Nasional RI Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 224–240.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023b). Kajian Identitas Nasional melalui Misi Bendera Merah Putih , dan bahasa Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 284–296.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023c). Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi melalui Kajian Filosofis Pembukaan UUD 1945 Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 297–311.
- Santoso, G., Murod, M., Winata, W., & Kusumawardani, S. (2023). Update Kecanggihan Google di Abad 21 Untuk Menjadikan Civic Digital. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 114–127.
- Santoso, G., Rahmawati, P., Murod, M., & Setiyaningsih, D. (2023). Hubungan Lingkungan Sekolah dengan Karakter Sopan Santun Siswa. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 91–99. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/131/36>
- Santoso, G., Salsabilla, E., Murod, M., & Faznur, L. S. (2023). Pengaruh Pergaulan Teman Sebaya terhadap Karakter Cinta Damai Anak. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 107–113.